

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini terkait ancaman kebakaran pada kawasan permukiman menyatakan bahwa kabupaten sumbawa memiliki ancaman kebakaran dengan kelas tinggi karena lebih besar dari nilai skor yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepala BNPB nomor 02 tahun 2015 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis proteksi kebakaran pada kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa yaitu terakait dengan wilayah manajemen kebakaran menyatakan bahwa kabupaten sumbawa masih memiliki kawasan permukiman yang berada di luar daerah layanan pos pemadam kebakn dengan luas kawasan permukiman yaitu 4700,06 Ha. Terkait untuk sarana prasarana proteksi kebakaran Kabupaten Sumbawa perlu adanya penambahan sarana prasarana proteksi kebakaran yaitu penambahan pos pembantu, pos sektor, dan hidran di beberapa titik wilayah di Kabupaten Sumbawa.

5.2 Saran

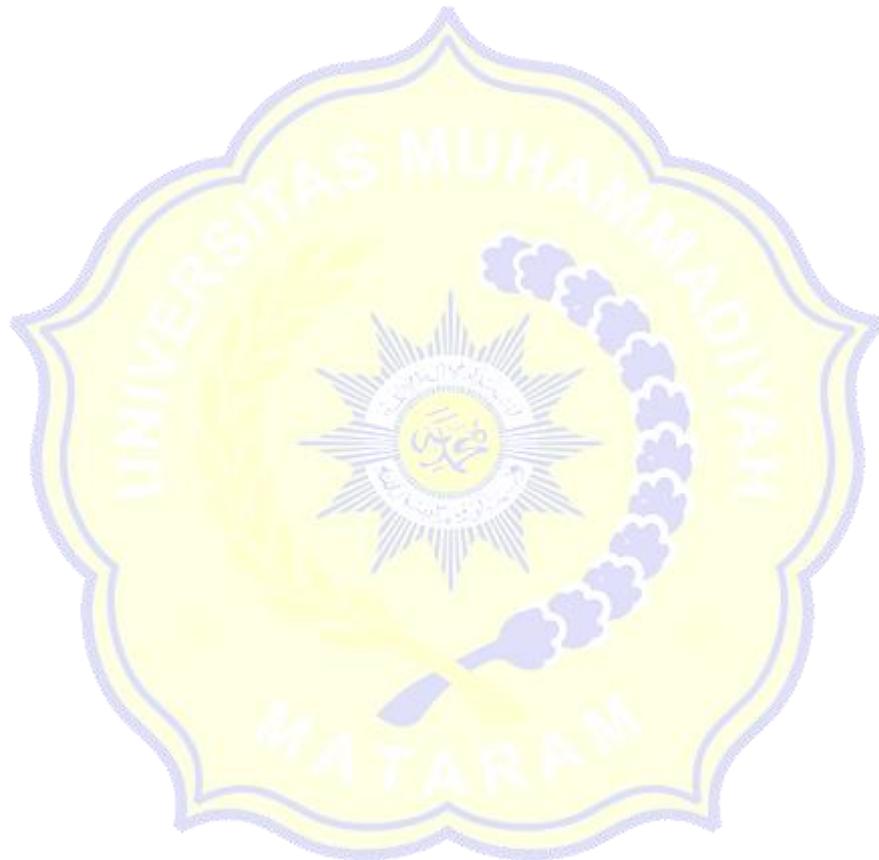
1. Parameter-parameter lain yang mempengaruhi ancaman dan proteksi kebakaran sebaiknya ditambahkan dalam penelitian selanjutnya supaya semakin maksimal.
2. Untuk sarana prasarana proteksi kebakaran perlu di tingkatkan supaya sesuai dengan pedoman permen PU no. 2 tahun 2009, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kebakaran pada kawasan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Y., Adyatma, S., & Arisanty, D. (2016). FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN KEBAKARAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 40.
- Aditianata, Fauzi, A. F., & Alfiyanti, A. (2017). ANALISIS KERENTANAN KEBAKARAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS: KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT). *Universitas Esa Unggul*, 3.
- Anwar, Y., & Lukas. (2019). KERENTANAN KEBAKARAN PERMUKIMAN PADAT DI KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA. *Jurnal Azimut*, 112.
- Aqli, W. (2010). Analisa Buffer Dalam Sistem Informasi Geografis Untuk Perencanaan Ruang Kawasan. *INERSIA*, 195-199.
- Dahlia, S., Rosyidin, W. F., Ramadhan, A., Haryadi, Anwar, K., Ersantyo, D., . . . Zahroh, A. A. (2019). PEMETAAN KERAWANAN KEBAKARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INTEGRASI PENGINDERAAN JAUH DAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN TAMBORA JAKARTA BARAT. *Jurnal Geografi*, 109.
- DAMKAR, S. (2022). *PROPOSAL PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SUMBAWA*. SUMBAWA BESAR: BUPATI SUMBAWA.
- Hartoyo, G. E., Nugroho, Y., Bhirowo, A., & Khalil, B. (2010). *Modul Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar*. Bogor: Tropenbos International Indonesia Programme.
- Kuncoro, A. A. (2022, Maret 31). *Sistem Inforasi Geografis*. Retrieved from Sistem Informasi Geografis S1 Teknik Informatika S.Kom: <http://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Informasi-Geografis/5d4ff01dea925dcf0fe65a2826f07179a639689>
- MenKumHam. (2007, April 26). Undang-Undang. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara RI.
- Muta'ali, L. (2013). *PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KOTA (Tinjauan Normatif-Teknis)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Muzani. (2020). *Bencana Kebakaran Permukiman*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Nirwansyah, A. W. (2016). *Dasar Sistem Informasi Geografis dan Aplikasinya Menggunakan ArcGIS 9.3*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- PerKa BNPB. (2012, Januari 12). Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kepala Badan Penanggulangan Bencana.
- Permendagri. (2018, Desember 27). Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- PermenPU. (2009, Agustus 20). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Menteri Pekerjaan Umum.
- PermenRI. (2016, MEI 25). Peraturan. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Saddam, H. (2021, Juni 24). *Analisis Overlay Dalam Sistem Informasi Geografis*. Retrieved from Geospasialis.com/analisis-overlay: <https://geospasialis.com/analisis-overlay/>
- Saraswati, D. F., & Cahyono, A. B. (2017). Analisis Daerah Risiko Bencana Kebakaran di Kota Surabaya Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Teknik ITS*, C403.
- Sari, P. Y., Soma, S., & Rohmadiani, L. D. (2020). Evaluasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran pada Permukiman Perkotaan. *TATA LOKA*, 299.
- Sholahuddin, M. (2015). SIG untuk Memetakan Daerah Banjir dengan Metode Skoring dan Pembobotan. *eprints Dinus*, 3.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi. (2001). *Penginderaan Jauh Untuk Studi Kota*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Sumbawa, M. (2019, November 29). *2019 Kasus Kebakaran Meningkat*. Retrieved from Media Sumbawa.com: <https://mediasumbawa.com/2019-kasus-kebakaran-meningkat/>

Wismarini, D., Sunardi, & Anis, Y. (2014). Metode Klasifikasi Spasial Sebagai Pendukung Informasi Kelas Pada Data Indikator Banjir. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 123-124.





LAMPIRAN

